

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komponen evaluasi pelaksanaan RKPD menggunakan berbagai indikator strategis seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), indikator keberhasilan program, dan pelaksanaan Renja (Rencana Kerja). Evaluasi dilakukan terhadap capaian misi pembangunan daerah, serta urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- 2) Tingkat capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup bervariasi. Beberapa indikator seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Indeks Ketahanan Pangan (IKP), dan Indeks Reformasi Birokrasi berhasil melampaui target. Namun, terdapat juga indikator yang belum tercapai, seperti Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, cadangan pangan daerah, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- 3) Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan RKPD antara lain adalah kolaborasi antarperangkat daerah, tersedianya regulasi dan dukungan anggaran, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara faktor penghambatnya meliputi keterbatasan infrastruktur, minimnya anggaran di

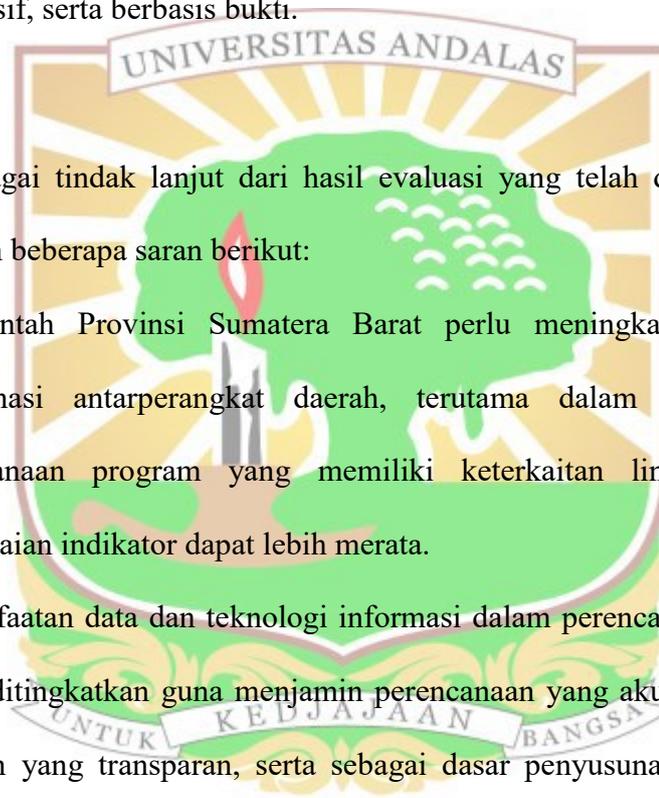
beberapa sektor, kurangnya koordinasi lintas instansi, serta dampak bencana alam dan keterbatasan data.

- 4) Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sangat penting sebagai alat ukur efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah serta sebagai dasar penyusunan perencanaan berikutnya. Hasil evaluasi tahun 2024 ini menunjukkan perlunya pendekatan perencanaan yang lebih adaptif, responsif, serta berbasis bukti.

5.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah, terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang memiliki keterkaitan lintas sektor, agar pencapaian indikator dapat lebih merata.
- 2) Pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam perencanaan dan evaluasi harus ditingkatkan guna menjamin perencanaan yang akurat dan pelaporan capaian yang transparan, serta sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif.
- 3) Perlu dilakukan penguatan peran serta masyarakat dan stakeholder non-pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan, khususnya pada urusan kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan.



- 4) Perencanaan RKPD tahun berikutnya hendaknya lebih memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan efisien dari sisi anggaran dan waktu pelaksanaan.
- 5) Peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pelaksana di tingkat OPD sangat penting agar mampu menyusun Renja yang lebih realistis, serta mampu menindaklanjuti hasil evaluasi secara sistematis.

